



BPKD

Kab. Pandeglang
Jl. A. Satria Wijaya No. 2

GEDUNG KARTINI

Jl. A. SATRIAWIJAYA NO. 2 PANDEGLANG

RENCANA KERJA TAHUNAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

RKT BPKD ini pada hakikatnya merupakan bagian dari perencanaan kerja pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

RKT secara umum adalah dokumen perencanaan tahunan yang mencakup program dan kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Secara spesifik, RKT BPKD merupakan rencana kerja tahunan di bidang administrasi keuangan daerah yang telah dijabarkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKD dan disusun untuk Tahun Anggaran 2025.

Meskipun masih jauh dari sempurna dan mengandung beberapa kekurangan, kami berharap RKT BPKD ini bermanfaat untuk memberikan arahan strategis serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKD. Untuk itu, segala masukan yang bersifat konstruktif akan kami tampung untuk perbaikan penyusunan RKT di masa yang akan datang.

Pandeglang, 2025

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang



YAHYA GUNAWAN KASBIN, S.Sos

NIP. 19761127 198801 1 001





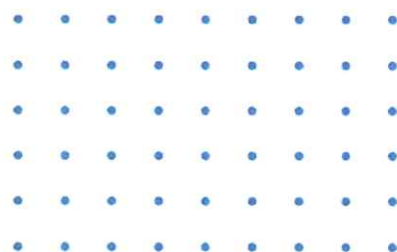
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024	8
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025	10
BAB III PENUTUP	12
3.1 Kesimpulan	13
3.2 Saran	13
LAMPIRAN	





Rencana Kerja
Tahunan 2025



BAB I

PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan merupakan penetapan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. Isi Rencana Kerja ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan, dengan demikian Rencana Kerja Tahunan hanya tinggal menjabarkan setiap tahunnya sasaran yang hendak dilaksanakan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai bagian dari upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang, penyusunan RKT ini juga mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang:

“PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING SEJAHTERA.”

Dalam konteks visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang berperan strategis dalam melaksanakan Rencana Kerja tahun 2025 berdasarkan dokumen Rencana strategi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026 terutama berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan





yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan perencanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- c) Pembinaan, Pelaksanaan dan evaluasi urusan bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Anggaran dan Barang Milik Daerah;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.





1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;





8. Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk menentukan sasaran strategik, indikator sasaran dan target yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 adalah Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang beserta pagu anggarannya sesuai dengan sasaran strategik yang telah ditetapkan.





1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan SKPD tahun lalu yang memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan SKPD tahun lalu dan Rencana Kerja Tahunan SKPD yang memuat Rencana Kerja Tahunan yang akan datang.

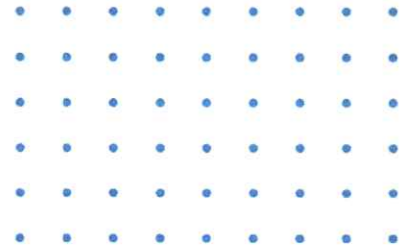
BAB III PENUTUP

Bab ini memuat lampiran Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Tahun lalu dan Rencana Kerja Tahunan.





Rencana Kerja
Tahunan 2025



BAB II

RENCANA KERJA TAHUNAN





2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024

Pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2024 secara keseluruhan dinilai sangat baik yaitu **92,75%**. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pencapaian target kinerja. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan. Hal tersebut berdampak pada pencapaian beberapa sasaran strategis, meskipun secara umum indikator utama tetap menunjukkan hasil yang memuaskan.

Sasaran strategis yang telah memenuhi target kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja akuntabilitas BPKD;
2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP);
3. Tersusunnya RAPBD dan RAPBD-P;
4. Pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif ;
5. Tertib dalam administrasi, fisik dan legal;
6. Potensi Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung PAD.

Dari 6 (enam) sasaran strategis yang ada, semuanya memenuhi target kinerja. Adanya sasaran yang kurang memenuhi target kinerja bukan berarti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tidak memiliki komitmen terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, namun hal ini berkaitan dengan adanya permasalahan - permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selama tahun 2024 antara lain:





1. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam bidang pengelolaan keuangan yang kurang memahami ketentuan yang berlaku;
2. Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengoperasian peralatan yang ada seperti : Komputer, Internet, dan sebagainya;
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Namun secara umum seperti yang telah diutarakan bahwa pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2024 dinilai sangat baik dan beberapa sasaran strategis yang mendukung visi dan misi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang secara langsung dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian beberapa catatan perlu diberikan terutama dalam hal mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang, maka program pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penatausahaan keuangan harus lebih diprioritaskan dalam perencanaan.





2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025

Mengingat Tahun Anggaran 2025 merupakan masa pelaksanaan RPJMD 2021–2026, maka program dan kegiatan pada BPKD Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 mencakup 6 (enam) sasaran strategis yang dirumuskan berdasarkan Renstra BPKD Tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja akuntabilitas BPKD.
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) secara tepat waktu dan berkualitas.
4. Mewujudkan pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan serta kas daerah yang efektif dan efisien.
5. Menjamin ketertiban administrasi, fisik, dan aspek legal dalam pengelolaan keuangan daerah.
6. Mengoptimalkan potensi Barang Milik Daerah daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap sasaran strategis ini akan diwujudkan melalui pendekatan program dan kegiatan yang dirancang secara efektif, terukur, dan terintegrasi. Untuk mendukung realisasi sasaran tersebut, langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. Menyediakan pelatihan teknis dan pembinaan bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis digital.





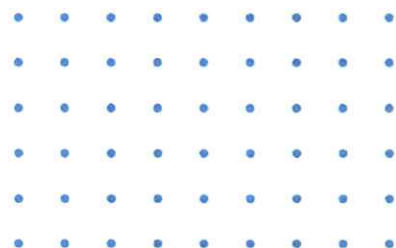
3. Memperkuat pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah daerah guna meminimalkan potensi penyimpangan.
4. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk mendukung pencapaian target kinerja.

Melalui Rencana Kerja Tahunan BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025, diharapkan visi dan misi BPKD dapat diwujudkan secara optimal. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta pencapaian hasil yang lebih efektif, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan daerah kabupaten pandeglang yang lebih baik.



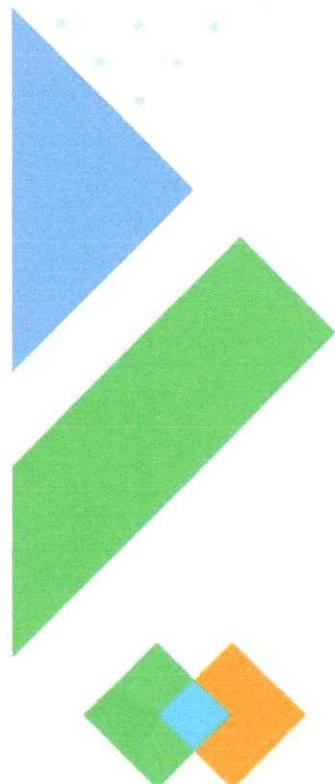


Rencana Kerja
Tahunan 2025



BAB III

PENUTUP





3.1 Kesimpulan

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun yang memuat sasaran strategis, indikator sasaran dan target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran berjalan. Penentuan Rencana Kerja didasarkan pada dokumen Renstra SKPD yang dalam hal ini Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 – 2026 guna mendukung visi, misi dan kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra.

Sebelum ditentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan identifikasi terhadap sasaran yang hendak dicapai supaya terjadi sinkronisasi antar berbagai dokumen perencanaan dari mulai Renstra, IKU, RKT, Tapkin dan Renja, dan pada tahap penentuan sasaran tahunan ini RKT memiliki peranan sentral dalam menentukan sasaran sampai kepada target kinerja yang akan dicapai.

3.2 Saran

1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan daerah agar dapat menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks.
3. Pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
4. Sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk OPD lain, harus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target kinerja secara maksimal.



Lampiran 1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Lalu
SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun : 2024

SASARAN STRATEGIS	KINERJA						REALISASI		CAPAIAN
	INDIKATOR			SATUAN	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BELANJA DAERAH				517,839,252,422.00	-	480,281,618,667.00	92.75
Meningkatnya kinerja akuntabilitas BPKD	Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator nilai SAKIP BPKD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				33,706,918,177.00		33,722,454,123.00	99.87
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				47,822,000.00		47,822,000.00	100.00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen	7	10,342,000.00	7	10,342,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,500,000.00	1	3,500,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RPKA-SKPD	Dokumen	1	3,500,000.00	1	3,500,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA - SKPD	Dokumen	1	4,500,000.00	1	4,500,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPPA - SKPD	Dokumen DPPA - SKPD	Dokumen	1	4,500,000.00	1	4,500,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian & Ikhtisar	Laporan	6	9,900,000.00	6	9,900,000.00	100.00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi	Dokumen	24	11,580,000.00	24	11,580,000.00	100.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				31,627,374,266.00		31,606,904,511.00	99.94
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	Dokumen	53	31,585,163,266.00	53	31,564,693,511.00	99.94
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	13,550,000.00	36	13,550,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun	Laporan	2	6,161,000.00	2	6,161,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan	Laporan	17	22,500,000.00	17	22,500,000.00	100.00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3,600,000.00		3,600,000.00	100.00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD	Laporan	36	3,600,000.00	36	3,600,000.00	100.00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				695,253,000.00		676,464,500.00	97.30
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	27,500,000.00	12	27,500,000.00	100.00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Bulan	12	477,676,000.00	11	472,056,000.00	98.82
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	23,327,000.00	12	23,327,000.00	100.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Perjalanan dinas	Bulan	12	166,750,000.00	12	153,581,500.00	92.10
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				722,968,911.00		721,391,012.00	99.78
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Listrik, Air dan Internet	Bulan	12	433,020,000.00	12	431,762,212.00	99.71
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya Jasa kantor	Bulan	12	289,948,911.00	12	289,628,800.00	99.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				888,800,000.00		888,272,100.00	99.46
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya BMD	Bulan	12	346,500,000.00	12	343,444,100.00	99.12
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya BMD	Bulan	12	323,400,000.00	12	322,828,000.00	99.82
Tersusunnya RAPBD dan RAPBD-P	Tersusunnya RAPBD secara tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				483,197,819,245.00		445,800,829,544.00	92.26
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				908,800,000.00		898,800,000.00	98.14
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2	68,200,000.00	2	68,200,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	97,960,000.00	2	97,960,000.00	100.00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RPA SKPD	Dokumen	64	93,000,000.00	64	93,000,000.00	100.00
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	64	47,400,000.00	64	47,400,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda	Dokumen	8	167,660,000.00	7	162,460,000.00	96.90
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Raperda	Dokumen	10	295,750,000.00	10	295,750,000.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Perbup/ KepBup	Dokumen	3	136,630,000.00	3	134,030,000.00	98.10
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				162,500,000.00		162,500,000.00	100.00
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP)	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembinaan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pembinaan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	11	73,000,000.00	11	73,000,000.00	100.00
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	89,500,000.00	12	89,500,000.00	100.00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				285,700,000.00		285,698,040.00	100.00
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Pelaporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	73	273,750,000.00	73	273,748,040.00	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan rancangan PERDA Tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	11,950,000.00	2	11,950,000.00	100.00
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Jumlah TPTGR	Bulan	12	-	12	-	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				481,793,419,245.00		444,404,532,173.00	92.24
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12	466.994.076.900.00	12	436.743.945.704.00	93.62
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	1	3.231.292.327.00	1	3.006.316.669.00	93.04
		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	326	11.568.050.018.00	132	4.654.069.800.00	40.23
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				49,600,000.00		49,599,331.00	100.00
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Aplikasi	2	49.600.000.00	2	49.599.331.00	100.00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				874,515,000.00		758,235,000.00	86.70
Tertib Administrasi, Fisik dan Legal, Serta Potensi aset yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD	Persentase aset yang tertib administrasi, fisik dan legal serta Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah				874,515,000.00		758,235,000.00	86.70
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Harga	Dokumen	1	75.000.000.00	1	74.580.000.00	99.44
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Dokumen	10	5.000.000.00	10	5.000.000.00	100.00
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	Laporan	816	12.040.000.00	816	12.040.000.00	100.00
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD	Laporan	64	101.300.000.00	64	101.300.000.00	100.00
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	700	392.490.000.00	555	311.115.000.00	79.27
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	150	112.085.000.00	112	83.600.000.00	74.59
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penetapan Penggunaan BMD, Dokumen Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD	Dokumen	21	73.800.000.00	21	67.800.000.00	91.87
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	64	32.200.000.00	64	32.200.000.00	100.00
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	60.600.000.00	2	60.600.000.00	100.00
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1	10.000.000.00	1	10.000.000.00	100.00

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

Tahun : 2025

SASARAN STRATEGIS	KINERJA				
	INDIKATOR		SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6
		BELANJA OPERASI			2,343
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			242
Meningkatnya kinerja akuntabilitas BPKD	Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator nilai SAKIP BPKD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	6
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			121
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	66
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Dokumen	36
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	2
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	17
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			36
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	36
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			4
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1

1	2	3	4	5	6
		Penyediaa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	5
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Laporan	12
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11
		Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan keuangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan BMD berupa kendaraan dinas jabatan/operasional	Unit	10
Tersusunnya RAPBD dan RAPBD-P	Tersusunnya RAPBD secara tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			272
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			142
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen	64
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen	64
		Koordinasi, Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD,Nota Keuangan,Pengantar Nota Keuangan dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD	Dokumen	4
		Koordinasi, Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD,Nota Keuangan,Pengantar Nota Keuangan dan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD	Dokumen	4

1	2	3	4	5	6
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Raperbup/Kepbup terkait Pelaksanaan APBD, Keputusan PPKD dan Keputusan Ketua TAPD/Sekda, Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan APBD, Penyusunan Rancangan Dokumen SSHB dan Perjalanan Dinas, Koordinasi Pelaksanaan Hibah Bansos, Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperbup Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	2
Pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif	Penatausahaan keuangan sesuai prosedur	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			22
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersusunnya Laporan Realisasi Dana Transfer, Laporan Realisasi Bantuan Keuangan, Laporan Realisasi DAK Fisik, Realisasi DAK Non Fisik	Dokumen	11
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan SP2D Instansi terkait	Tersusunnya Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja, Berita Acara Rekonsiliasi Saldo Kas dan Evaluasi SPJ Fungsional OPD	Dokumen	11
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			83
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	77
		Koordinasi Penyusunan RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan RAPERBUP tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	Tersusunnya RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan RAPERBUP tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota	Kegiatan	2
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tersusunnya Laporan Majelis TP-TGR	Dokumen	4

1	2	3	4	5	6
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			24
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersusunnya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		-
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	12
		Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah			1
		Implementasi dan Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan Daerah	Aplikasi	1
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,829
Tertib Administrasi, Fisik dan Legal, Serta Potensi aset yang dapat dimanfa'atkan untuk meningkatkan PAD	Persentase aset yang tertib administrasi, fisik dan legal serta Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,829
		Penyusunan Standar Harga	tersusunnya Dokumen Standar Harga	Dokumen	1
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	10
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan Persediaan, Dokumen Laporan Pengelolaan BMD Bulanan, Laporan Konsolidasian Persediaan dan BMD	Dokumen	816
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	64
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	700
		Penilaian Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	150
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Penetapan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	21
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Tersusunnya Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Laporan BMD	Laporan	64
		Penyusunan Laporan BMD	Tersusunnya Dokumen Laporan BMD semesteran dan tahunan	Laporan	2
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD	Orang	1